



## KESBANGPOL YOGYA GANDENG ORMAS Dari 203, Baru 29 Persen yang Resmi Terdaftar

**YOGYA (KR)** - Dari total 203 organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ada di Kota Yogya ternyata baru 29 persen atau sekitar 60 ormas yang secara resmi telah terdaftar. Terutama yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogya.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogya Nindyo Dewanto, berharap ormas-ormas di Kota Yogya agar melakukan pendaftaran ke instansinya. "Memang kita masih berharap ormas-ormas ini memenuhi regulasi yang ada untuk melakukan pendaftaran ke Kesbangpol," harapnya, Kamis (21/3).

Pendaftaran itu untuk ketertiban administrasi dan memudahkan Pemkot Yogya melakukan pembinaan dan memetakan program yang menasar ormas. Berdasarkan UU 16/2017 terkait organisasi kemasyarakatan, disebutkan setiap ormas harus memiliki legalitas baik berwujud badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham maupun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan juga diatur berdasarkan

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017.

Informasi dan formulir pendaftaran ormas di Kota Yogya dapat diakses di laman [kesbang.jogjakota.go.id](http://kesbang.jogjakota.go.id). Di sana terdapat link pendaftaran ormas dan tinggal mengikuti persyaratannya. Pendaftaran ormas dilayani setiap tahun. Data dari pendaftaran ormas itu untuk mencocokkan dan memastikan keberadaan serta aktif tidaknya di Kota Yogya. "Setiap tahun kita pasti melakukan pendataan. Dari data yang ada kita cocokkan. Ormas-ormas kita minta semacam daftar ulang lagi. Paling tidak mengabari terkait keberadaan ormas ini masih ada atau tidak," imbuh Nindyo.

Salah satu syarat pendaftaran ialah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan serta program kerja yang jelas. Bagi ormas yang sudah terdaftar maupun berbadan hukum masih memiliki kewajiban untuk melaporkan keberadaannya pada pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol. Hal ini untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengembangan dan menempatkan ormas sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program kegiatan pemerintah. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005